



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUH. INDRAYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
3. NHK : **21307**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 999.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 363 m2/198 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 590.500.000
2. Tanah Seluas 210 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 296.000.000
3. Tanah Seluas 496 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 37.000.000
4. Tanah Seluas 1583 m2 di KARANGANYAR, WARISAN Rp. 76.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 173.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
4. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
5. MOBIL, HONDA BRIO RS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 18.786.500****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	816.111.908
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.007.898.408
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.007.898.408

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.